

Format Usulan Program RAN OGI VII 2023-2024

Negara	Indonesia		
Nomor dan Nama Komitmen	(...) Pengembangan Tata Kelola dan Transparansi Satu Data Tematik Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
Deskripsi Singkat Komitmen	Pengembangan Tata Kelola dan Transparansi Satu Data Tematik Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara transparan, akuntabel, kolaboratif, dan berkelanjutan, yang meliputi integrasi, pemeriksaan, pengelompokan, dan manajemen akses data bagi publik.		
Pengusul Komitmen	Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Yayasan AURIGA, Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink)		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya (Parlemen, Sektor Privat, dll)
	Lead : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) Bappenas 2. Badan Informasi Geospasial 3. Badan Pusat Statistik (BPS) Kementerian terkait: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Pusdatin/Biro KLIK) 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Biro Humas/Pudatin) 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pemerintah Daerah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Provinsi Riau 	<ul style="list-style-type: none"> • Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, • Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), • Yayasan AURIGA, • Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Informasi Pusat RI 2. Komisi Pemberantasan Korupsi RI (Tim Stranas PK SDA)

Jangka Waktu	Januari 2023 - Desember 2024
---------------------	------------------------------

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Terdapat kendala yang dialami oleh masyarakat sipil khususnya di daerah dalam mengakses data sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tata ruang (selanjutnya semuanya disebut sebagai 'data SDA-LH'). Kendala tersebut salah satunya diakibatkan oleh tata kelola data yang belum optimal, meski sudah tiga tahun sejak Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia berlaku. Permasalahan tata kelola data tersebut diantaranya (1) belum semua data tersedia dan terstandar; (2) data yang tersedia masih dalam bentuk data dasar; (3) terbatasnya akses informasi SDA, khususnya terkait industri ekstraktif dan kehutanan; (4) terbatasnya akses masyarakat pengguna informasi untuk terlibat dalam Forum Data dan proses Satu Data (Suryani, 2022).

Data SDA-LH seharusnya dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Agar hak masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan dan memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945 terjamin, terdapat hak akses masyarakat atas pengelolaan SDA yang perlu terpenuhi, yaitu (1) hak atas informasi; (2) hak atas partisipasi; dan (3) hak atas akses keadilan. Pemenuhan hak atas informasi SDA-LH menjadi titik krusial, karena dengan informasi yang memadai, masyarakat dapat berpartisipasi secara berarti dan memperoleh keadilan atas pengelolaan SDA-LH. Sebaliknya, keterbatasan akses masyarakat atas data SDA-LH berarti keterbatasan publik atas akses informasi dari kegiatan dan program yang diperuntukkan baginya, dan justru akan membahayakan kesehatan, masa depan, dan hidup masyarakat secara luas.

Permasalahan tata kelola data SDA-LH juga dapat berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan. Sejak kebijakan Satu Peta diberlakukan pada tahun 2016, berdasarkan Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang (PITTI) hingga saat ini terdapat 77.365.141 ha atau sekitar 40,6% dari luas daratan Indonesia yang tumpang tindih, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Berkurangnya kontrol atas pengelolaan SDA-LH karena terbatasnya pengawasan dan keterlibatan masyarakat berpotensi membuka celah bagi perilaku koruptif. Pada akhirnya, selain berdampak secara finansial, korupsi di sektor SDA juga berdampak pada rusaknya lingkungan dan ruang hidup (Kartodihardjo, 2020).

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Masalah ini terjadi karena (1) persoalan prioritas, yaitu penyelenggaraan Satu Data masih memprioritaskan data terkait perencanaan saja. Data SDA merupakan data tematik (baik statistik sektoral maupun data geospasial) yang bukan prioritas, data tersebut belum disediakan untuk proses integrasi data lingkungan hidup dan SDA ke tingkat pusat; (2) persoalan kewenangan data, yaitu sebagian besar data merupakan kewenangan pusat, sehingga sulit untuk mempublikasikan keseluruhan alur data; (3) persoalan kebijakan, yaitu pembaharuan kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan pasca UU Cipta Kerja yang berdampak pada kewenangan penyelenggaraan pengelolaan SDA dan LH; (4) persoalan sistem, yaitu akuntabilitas yang belum difasilitasi oleh sistem data yang terintegrasi antara pusat dan daerah; dan (5) persoalan komitmen, yaitu adanya data SDA yang kemudian diperlakukan sebagai dokumen rahasia, sementara data SDA tersebut menyangkut kepentingan publik yang berdampak pada pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan dari pengelolaan SDA, serta pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Deskripsi Komitmen	
1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?	<p>RAN terkait penguatan Tata Kelola Data LH-SDA pernah diangkat dalam RAN OGI 2018-2020 dan Tata Kelola Satu Data Indonesia di RAN OGI 2020 - 2022. Dalam RAN OGI 2020 - 2022, dilaksanakan penguatan tata kelola Satu Data pada 7 daerah pilot di Indonesia. Kendala ditemui pada penguatan tata kelola Satu Data sektor SDA-LH khususnya data lingkungan hidup di Provinsi Riau tidak menjadi prioritas walaupun selalu dibahas dalam Forum Data, penyebabnya sebagaimana disebut pada Identifikasi Masalah di atas. Telah diupayakan juga pendekatan kepada Pusat Data Informasi KLHK sebagai Walidata Pusat maupun Dinas Komunikasi dan Informasi dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai Walidata Daerah. Akan tetapi, pendekatan tersebut belum membuahkan hasil karena dilakukan secara sporadis dalam forum yang terpisah, sementara seharusnya hal tersebut dapat difasilitasi oleh Forum Satu Data melalui Satu Data Indonesia (Bappenas).</p>
2. Solusi apa yang diusulkan?	<p>Terkait dengan upaya yang telah dilakukan sebagaimana dijelaskan pada poin 1 diatas, sebagian besar dari organisasi perangkat daerah terkait SDA-LH (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian, ESDM) melihat perlu adanya kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan kewenangan dan <i>business process</i> pelaksanaan integrasi Satu Data SDA-LH (perencanaan dan standar, pengumpulan dan penerimaan, pemeriksaan dan pengelompokan, penyediaan dan pertukaran, serta penyebaran). Melihat kebutuhan tersebut, di pengembangan Satu Data Tematik SDA-LH diusulkan sebagai solusi untuk perbaikan tata kelola data SDA-LH. Satu Data Tematik SDA-LH akan menyediakan <i>business process</i> tata kelola data SDA-LH sekaligus Forum Satu Data sebagai wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Satu Data Tematik SDA-LH mengintegrasikan solusi atas permasalahan tata kelola data pada masing-masing instansi yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri, yaitu data lingkungan hidup dan kehutanan pada KLHK, data industri ekstraktif pada Kementerian ESDM, dan data tata ruang pada Kementerian ATR/ Badan Pertanahan Nasional.</p>
3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?	<p>Yang hendak dicapai dengan implementasi komitmen ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesepakatan dan kesepakatan antara Instansi Daerah dan Instansi Pusat tentang kewenangan dan <i>business process</i> tata kelola data tematik SDA-LH yang terbentuk melalui Forum Satu Data secara rutin; 2. Adanya <i>business process</i> tata kelola data tematik SDA-LH yang terkelola dengan transparan, kolaboratif, dan berkelanjutan, yaitu dari perencanaan dan standar, pengumpulan dan penerimaan, pemeriksaan dan pengelompokan, penyediaan dan pertukaran, serta penyebaran data; 3. Adanya integrasi data tematik SDA-LH yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan, baik instansi dan lembaga maupun masyarakat sipil.

Analisa Komitmen	
Pertanyaan	Jawaban (jika tidak berlaku, isi dengan N/A)
1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?	Komitmen ini akan mendorong transparansi dengan memberikan akses bagi masyarakat untuk hadir dalam

	<p>Forum Satu Data. Melalui forum tersebut, masyarakat dapat memantau proses pengembangan Satu Data Tematik SDA-LH sekaligus berpartisipasi dalam tiap tahap prosesnya. Pada akhirnya, komitmen ini memberikan akses bagi masyarakat atas data SDA-LH karena mendorong akses masyarakat atas informasi dan data SDA-LH.</p>
<p>2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?</p>	<p>Transparansi dan kolaborasi tata kelola data SDA-LH yang didorong oleh komitmen ini akan menumbuhkan keterbukaan atas data SDA-LH dan akuntabilitas pengelolaan SDA-LH. Akuntabilitas pengelolaan SDA-LH akan berdampak positif bagi perbaikan tata kelola SDA-LH itu sendiri, misalnya sebagaimana terlihat dari kajian PWYP Indonesia pada tahun 2020 atas transparansi dan akuntabilitas kontrak industri ekstraktif pada sektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batubara (minerba).</p> <p>Ketersediaan data terkait pengelolaan SDA-LH, khususnya data terkait dokumen perizinan, kontrak dan tata ruang juga akan mempermudah melakukan pengawasan terhadap peran para stakeholders dalam memenuhi kewajiban masing-masing. Selain itu, masyarakat juga akan terlibat secara proaktif dalam melakukan pengawasan. Masyarakat dapat memberi masukan kepada Pemerintah selaku pemegang kontrol, dan membantu memantau pelaksanaan izin, kontrak, maupun rencana tata ruang dan wilayah di lapangan.</p> <p>Akuntabilitas data sektor SDA-LH akan membantu pemerintah mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dalam pengelolaan SDA, mendorong perbaikan manajemen pemerintah, meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan partisipasi warga negara dalam pengelolaannya. Tidak hanya itu, keterbukaan kontrak dapat mengurangi praktik korupsi karena kerahasiaan dokumen kontrak dan perizinan ditengarai menyebabkan kerugian bagi keuangan negara akibat adanya celah korupsi, salah urus, dan kondisi perusahaan yang tidak akuntabel.</p>
<p>3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?</p>	<p>Komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pelibatan masyarakat sipil dalam pengembangan Satu Data Tematik SDA-LH, yaitu pada setiap tahap <i>business process</i> nya. Selain itu, pengumpulan data SDA-LH juga akan dilaksanakan secara kolaboratif, termasuk pengumpulan data yang diproduksi oleh masyarakat. Masyarakat juga dilibatkan secara aktif dalam Forum Satu Data bersama dengan Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Pelaksanaan Satu Data Tematik SDA-LH yang memberi akses dan melibatkan masyarakat akan membuka ruang penyelesaian permasalahan disintegrasi data dan tumpang</p>

	tindih peta lebih cepat, pada akhirnya menjamin lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan. Adanya pengawasan dari publik berdasarkan dokumen yang dibuka akan memberikan daya tekan lebih ke K/L/D terkait untuk percepatan pelaksanaan kebijakan Satu Data.
--	---

Perencanaan Komitmen

(Ini proses perencanaan awal yang melihat ukuran keberhasilan dan output yang diharapkan, serta pemangku kepentingan utama yang terlibat.)

Ukuran Keberhasilan (Ukuran Keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dijalankan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai komitmen.)	Output yang Diharapkan (Output adalah hasil konkret, dapat diverifikasi secara objektif yang merupakan produk langsung dari kegiatan yang dilaksanakan atau diimplementasikan.)	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan
---	--	--	----------------------

Pengumpulan Bahan untuk Perencanaan Satu Data Tematik SDA-LH, termasuk Penyusunan Standar Data

1.1. Adanya diskusi terfokus dan diskusi publik yang difasilitasi oleh forum OGI dan Satu Data Indonesia untuk membahas progres Satu Data atas data terkait SDA-LH, diantaranya data terkait: a. perizinan dan kontrak pengelolaan SDA khususnya sektor kehutanan, minerba, dan migas; b. data lingkungan hidup dan kehutanan, yang terdiri dari data lokasi (data terkait lingkungan, sosial, risiko kebencanaan), data riwayat kepatuhan, dan data sektor (misalnya: perkebunan, potensi, pendapatan negara dari sektor ini), data perhutanan sosial, data perizinan, pemberlakuan peta tematik satu peta.	Policy Brief OGI dan Satu Data Indonesia terkait Pemetaan Potensi dan Tantangan Pelaksanaan Satu Data sektor SDA-LH	Januari 2023 - Maret 2023	Penanggungjawab Utama: Satu Data Indonesia		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	PWYP Indonesia, ICEL, Auriga, MediaLink	
			Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Biro Humas/Pudatin)		
			Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan		

c. Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta terkait SDA-LH, termasuk akses dan pelibatan masyarakat.			Pertanahan Nasional		
1.2. Adanya Forum Satu Data antara Satu Data Indonesia, dengan instansi pusat dan daerah yang berwenang atas pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta agraria dan tata ruang untuk menyepakati: a. kewenangan tata kelola data SDA-LH; b. <i>business process</i> tata kelola data SDA-LH.	1. Kesepakatan antara instansi pusat dan daerah yang terkait dengan pengelolaan SDA-LH terkait kewenangan tata kelola data SDA-LH 2. Kesepakatan antara instansi pusat dan daerah yang terkait dengan pengelolaan SDA-LH terkait <i>business process</i> tata kelola data SDA-LH	April 2023 - Juni 2023	Pemerintah Provinsi Riau		
1.3. Disempurnakannya standar, prosedur penyediaan data, penerimaan data, dan pertukaran data antara Pemerintah Pusat dengan walidata, termasuk adanya peta jenis data pada masing-masing instansi yang dapat diakses oleh dan disusun berdasarkan pelibatan partisipasi masyarakat	1. Standar Operasional dan Prosedur Satu Data Tematik SDA-LH 2. Peta Jenis Data SDA-LH pada masing-masing instansi	Juli 2023 - Agustus 2023			

Integrasi Data SDA-LH: Pengumpulan, Pemeriksaan, Pengelompokan, Pertukaran Data					
Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan dan integrasi Satu Data yang transparan, responsif, solutif, partisipatif, dan berkelanjutan antara Forum Data Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.	1. Data SDA-LH tersedia dalam format bagi pakai sesuai standar data 2. Data SDA-LH serta peta indikatif yang disusun oleh masyarakat sipil masuk dan terintegrasi dalam Satu Data Tematik SDA-LH 3. Forum Satu Data terlaksana secara rutin dan berkelanjutan.	September 2023 - Juni 2024	Penanggungjawab Utama: Satu Data Indonesia		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Biro Humas/Pudatin) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pemerintah Provinsi Riau	PWYP Indonesia, ICEL, Auriga, MediaLink	Komisi Informasi Pusat Komisi Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)
Publikasi dan Penyebarluasan Data SDA-LH					
Dokumen/data dan informasi penataan ruang	Data SDA-LH termasuk perizinan, kontrak, dan dokumen terkait tata ruang	Juli - Desember 2024	Penanggungjawab Utama: Satu Data Indonesia		
			Pemangku Kepentingan Pendukung:		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)

perlindungan SDA dan lingkungan berkelanjutan, izin dan kontrak SDA dipublikasi dalam portal Satu Data Tematik SDA-LH sesuai standar Satu Data Indonesia yang wajib tersedia setiap saat sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008.	dapat diakses publik di portal data		<p>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Biro Humas/Pudatin)</p> <p>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</p> <p>Pemerintah Provinsi Riau</p>	PWYP Indonesia, ICEL, Auriga, MediaLink	<p>Komisi Informasi Pusat</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)</p>
--	-------------------------------------	--	--	---	--